

**EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN
SPT TAHUNAN PPh BADAN TERKAIT UPAYA OPTIMALISASI
PENERIMAAN PPh BADAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA**

CAKUNG DUA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai Gelar Sarjana

Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Darma Persada

Disusun Oleh :

ILHAMI TRIANASARI

03420011



FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2008



FAKULTAS EKONOMI -- UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUTANSI

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul:

EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN
SPT TAHUNAN PPh BADAN TERKAIT UPAYA OPTIMALISASI
PENERIMAAN PPh BADAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA
CAKUNG DUA

Oleh :

Nama : Ilhami Trianasari

NIM : 03420011

Telah disetujui untuk diujikan

Jakarta, Juni 2008

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing Materi

(Drs. Boedi. S. Hartono, Ak, MM)

(Drs. Boedi. S. Hartono, Ak, MM)



FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul:

EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN

SPT TAHUNAN PPh BADAN TERKAIT UPAYA OPTIMALISASI

PENERIMAAN PPh BADAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA

CAKUNG DUA

Telah dipertahankan dihadapan sidang Tim Penguji Skripsi pada

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2008

Oleh :

Nama : ILHAMI TRIANASARI

NIM : 03420011

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. Boedi S. Hartono, AK. MM	Ketua
2. Drs. Haryanto, AK. MM	Anggota
3. Drs. Sunarto Widodo, AK. MM	Anggota

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAMI TRIANASARI

No. Pokok : 03420011

Jurusan : Akuntansi

Peminatan : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Terkait Upaya Optimalisasi Penerimaan PPh Badan Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua”**, yang merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Drs. Boedi. S Hartono, AK, MM, tidak merupakan jiplakan hasil karya orang lain sebagian atau seluruhnya, dan menjadi tanggung jawab sendiri. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Juli 2008

6000
Tgl.
M. ENT. B. S. H. T. E. M. B. E. L.


ILHAMI TRIANASARI

ABSTRAK

- (A) Nama : ILHAMI TRIANASARI
- (B) Judul : **EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TERKAIT UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PPh BADAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA**
- (C) Lembar Halaman : X 79
- (D) Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Terkait Upaya Optimalisasi Penerimaan PPh Badan
- (E) Alasan dan Tujuan : Untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan terkait upaya optimalisasi penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua karena adanya *system self assesment* yang pada saat ini diberlakukan bagi semua wajib pajak. Untuk melengkapi data yang diperlukan dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan para fiskus (aparatur pajak) guna memperoleh kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan sangat penting bagi suatu KPP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- (F) Hasil Penelitian : KPP Pratama Jakarta Cakung Dua telah menerapkan dan menjalankan *system self assesment*, namun belum maksimal. Dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran dan kepatuhan serta tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- (G) Kesimpulan dan Saran : Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan belum secara maksimal sehubungan dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, selain itu kurangnya jumlah aparatur pajak yang tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak. Dari jumlah SPT Tahunan yang disampaikan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 yaitu sebanyak 2656 lembar. Jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan hanya sebanyak 645 lembar atau hanya sebesar 24,29 %, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak masih dikategorikan rendah. Sedangkan dari perhitungan analisis rasio vertikal dan horizontal dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami naik turun. Perlu ditingkatkan penyuluhan baik dari media massa maupun elektronik, dan pengawasan oleh aparatur pajak serta menambah jumlah aparatur pajak yang handal dan profesional.
- (H) Daftar Pustaka : 11 buku (2000-2006)
- (i) Pembimbing Materi : Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan untuk menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang tidak ternilai harganya.

Oleh sebab itu, sudah sewajarnya dan dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, AK, MM, yang telah dengan sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penulisan hingga skripsi ini telah terselesaikan dan sebagai Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi.
2. Seluruh staf pengajar dan petugas dan petugas Tata Usaha Fakultas Ekonomi atas segala didikan, bantuan, perhatian dan kerjasamanya yang telah terjalin selama ini.
3. Bapak dan Ibu atas Do'a, dukungan dan semangat yang tidak pernah putus diberikan kepada saya. Terima kasih sudah membekali Aie dengan "sesuatu" yang tidak akan pernah terbalas sampai kapan p.n.

4. Kakak-kakakku tercinta (Wahyu Eko Saputro dan Dwi Kurniawan Saputro) dan kakak iparku (Asti dan Meylina), atas nasihat dan dorongan semangat selama Aie menyusun skripsi.
5. Kepada seluruh staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua. Terima kasih bantuan dan bimbingan yang diberikan selama saya melaksanakan magang disana.
6. Kepada sahabatku “Bety, Sukma, Dwie, Linda” terima kasih untuk kebersamaannya dalam susah dan senang.
7. Teman-teman seperjuanganku, Fitri, Devina, Hikmah, Mifta, Juleha, Ayu, Dian, dan Trivena. Terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan kita selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Maka kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan kesempurnaan skripsi ini sangatlah diharapkan. Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Juni 2008

Penulis

Ilhami Trianasari

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
ABSTRAK	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Perumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.6 Kerangka Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pajak	11
2.2 Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000	13
1. Subjek Pajak Penghasilan	14
2. Kewajiban Pajak Subjektif	17
3. Objek Pajak Penghasilan	19
2.3 Cara Menghitung Pajak	24
2.4 Pajak Penghasilan Badan	25
1. Subjek Pajak Penghasilan Badan	26
2. Pengecualian Subjek Pajak Badan	27
3. Objek Pajak Penghasilan Badan	27

2.5	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	32
2.6	Target SPT Yang Diharapkan dan Realisasi SPT Yang Diterima	33
2.7	Kepatuhan Dalam Perpajakan	34
BAB III	OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN	
3.1	Objek Penelitian	37
3.2	Aspek-aspek Yang Diteliti	37
	1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	37
	2. Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	38
	3. Penyuluhan dan Sosialisasi	38
3.3	Metode Penelitian	39
	1. Sumber dan Jenis Data	39
	2. Tehnik Pengumpulan Data	39
	3. Analisis Data	40
BAB IV	PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum KPP Pratama Cakung Dua	42
	1. Sejarah Singkat Berdirinya KPP	42
	2. Motto, Misi, dan Visi KPP	42
	3. Fungsi dan Tugas KPP	44
	4. Batas Wilayah Kerja KPP	45
	5. Struktur Organisasi KPP	46
	6. Penyebaran Pegawai KPP	47
4.2	Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Dengan Optimalisasi Penerimaan PPh Badan	47
	1. Wajib Pajak PPh Badan	47
	2. Proses Penyelesaian SPT Tahunan PPh Badan	49

3.	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan	53
4.	Hubungan Penyampaian SPT Tahunan Dengan Penerimaan	61
5.	Penerimaan PPh Badan	63
4.3	Pembahasan	65
1.	Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan	65
2.	Hambatan-hambatan Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan	68
3.	Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan	70
4.	Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Intensifikasi Wajib Pajak	72
5.	Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak	73
6.	Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh KPP	75
7.	Langkah-langkah Yang Diambil Oleh KPP	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif	17
Tabel 2	Variabel Kepatuhan	35
Tabel 3	Wajib Pajak PPh Badan Yang Terdaftar	48
Tabel 4	Proses Penyelesaian SPT	52
Tabel 5	Perkembangan Penerimaan SPT Tahunan PPh Badan	53
Tabel 6	Pengolahan SPT Tahunan PPh Badan	56
Tabel 7	Keadaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	58
Tabel 8	Keadaan Surat Ketetapan Pajak Wajib Pajak Badan	60
Tabel 9	Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Badan	64
Tabel 10	Rasio Vertikal	66
Tabel 11	Rasio Horizontal	66
Tabel 12	Total Vertikal dan Horizontal	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang dijelaskan di dalam pembukaan Undang-undang 1945, yaitu Negara Indonesia didirikan adalah untuk mencapai tujuan, dan salah satu tujuan ini merupakan cita-cita kemerdekaan Negara kita dapat disebutkan dengan singkat yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut harus dilakukan usaha-usaha kegiatan yang salah satunya adalah melalui pembangunan nasional.

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit di mana kebutuhan dana tersebut setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dan jumlah masyarakat.

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan suatu Negara, khususnya Indonesia, diperoleh dari APBN yang di dalamnya terdapat penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dalam negeri yang berasal dari Migas dan Non Migas merupakan andalan utama penerimaan Negara, sedangkan penerimaan luar negeri yang berasal dari pinjaman ini merupakan hanya sebagai pelengkap dana pembangunan.

Sejak tahun 1980-an hingga sekarang ini penerimaan dari Migas cenderung turun, maka keadaan ini sangat berpengaruh pada penerimaan Negara. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan penerimaan Negara, terutama dengan mengupayakan penerimaan dari sektor Non Migas. Kebijakan yang dilakukan adalah menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah di dalam penerimaan Negara.

Pemungutan pajak harus berjalan seiring dengan pembangunan. Kebijakan perpajakan harus dapat merangsang investasi diberbagai sektor, karena pertumbuhan investasi berarti bertambahnya potensi pemasukan pajak. Sehingga pajak bukan lagi dianggap sebagai beban bagi sebagian masyarakat, karena masyarakat merasa dengan membayar pajak dapat mengurangi penghasilan yang seharusnya diterima, selain itu tidak ada kontraprestasi langsung yang dapat dirasakan. Dengan berkurangnya pemasukan pajak berarti melemahnya kemampuan Negara dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, maka pemerintah telah melakukan perubahan yang mendasar di bidang perpajakan (*national tax reform*). Jika dahulu sistem pemungutan pajak yang sangat bergantung pada peran aktif dari pihak aparat pajak (*official assessment system*), maka sekarang ini wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk berperan aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya (*self assesment system*).

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pajak Penghasilan), sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan sistem *self assesment*.

Pengertian sistem *self assesment*, termasuk pula pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi atau badan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Setiap sekali dalam setahun setelah tahun pajak berakhir, wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana wajib pajak itu terdaftar. Dengan demikian dalam SPT tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut dapat diketahui besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang merupakan penerimaan pajak bagi Negara.

Dalam pelaksanaan sistem *Self Assesment* dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta keinginan untuk membayar pajak yang diwujudkan disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktunya wajib pajak sendiri yang mengisi SPT pada waktu yang telah ditentukan di dalam Undang-undang.

Karena kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan merupakan salah satu bentuk perwujudan peran serta masyarakat khususnya wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan merupakan salah satu bukti kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya.

Selama ini ternyata kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dalam menyampaikan SPT tahunan PPh badan masih sangat rendah.. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya SPT yang diterima. Seperti halnya diketahui bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh badan yang disampaikan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak berarti wajib pajak tersebut telah memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak. Hal tersebut berarti menyatakan bahwa adanya hubungan antara penyampaian SPT dengan penerimaan pajak.

Dengan demikian, dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua tersebut di atas berkaitan erat dengan penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Karena kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT merupakan satu bentuk perwujudan peran serta masyarakat khususnya wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penulisan skripsi ini mengambil judul **“Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam**

Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Terkait Upaya Optimalisasi Penerimaan PPh Badan Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua”

1.2 Identifikasi Masalah

Maka penulis dalam penulisan skripsi ini mengambil sebuah pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan PPh Badan terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua ?
2. Bagaimana upaya mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan agar dapat mengoptimalkan penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua?
3. Bagaimana mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari penulisan skripsi ini adalah melihat pada rencana target SPT yang diharapkan terhadap Realisasi SPT yang diterima pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

4. Perumusan Masalah

Maka penulis dalam penulisan skripsi ini mengambil sebuah perumusan masalah yaitu :

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan PPh Badan dapat mengoptimalkan penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

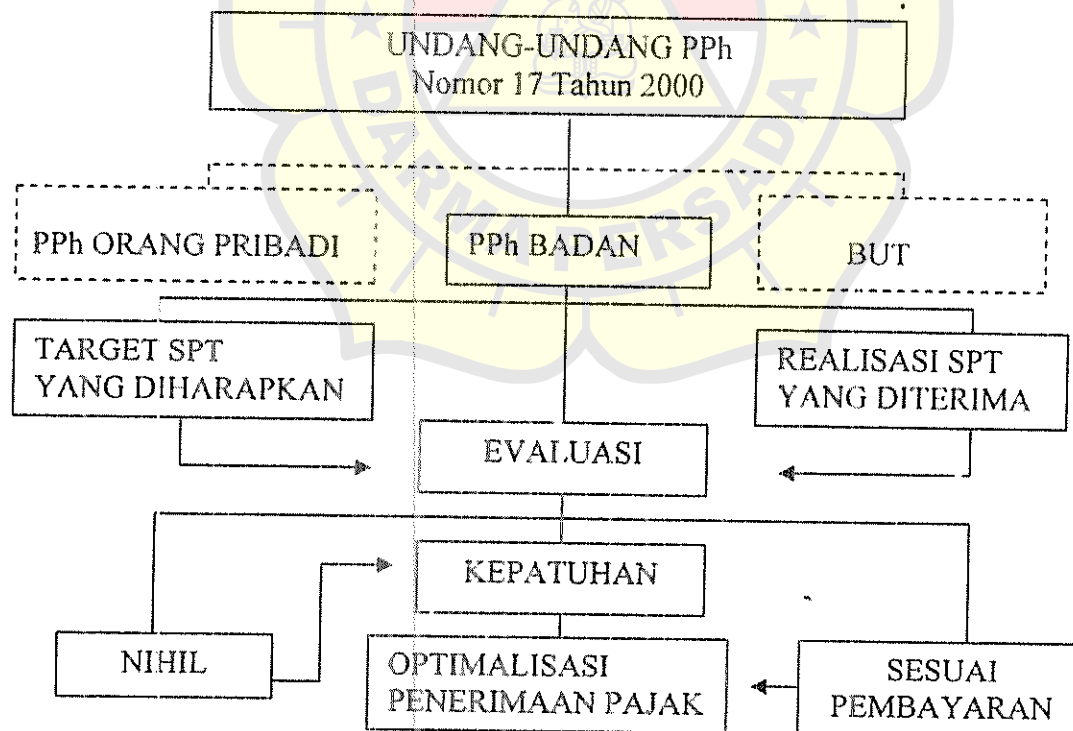
1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi seberapa besar hubungan ketepatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dengan tingkat penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.
- b. Untuk mengevaluasi hambatan-hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti mengenai perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dengan penerimaan PPh Badan.
- b. Sebagai masukan bagi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua untuk lebih meningkatkan pelayanannya.
- c. Dapat melengkapi kepustakaan, sehingga rekan-rekan mahasiswa dapat mengambil manfaat yang baik dan mengkaji kekurangan karya ilmiah dimasa mendatang.

1.6 Kerangka Pemikiran



Sumber : Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 yang dikembangkan oleh penulis.

Keterangan :

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan membahas secara jelas bahwa subjek pajak penghasilan dibagi menjadi menjadi 3, yaitu orang pribadi, badan, dan BUT. Pada skripsi ini penulis hanya membahas tentang PPh Badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan Negara melalui pajak khususnya PPh Badan, KPP perlu menetapkan target SPT yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja dari pihak fiskus dengan cara sosialisasi perpajakan.

Setelah menetapkan target SPT yang diharapkan KPP dapat melihat hasil dari realisasi SPT yang diterima. Dari target SPT yang diharapkan dan realisasi SPT yang diterima dapat dievaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, apakah sudah sesuai dengan pembayaran dan ketentuan yang berlaku atautkah nihil. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak diharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I ini, Penulis membahas tentang latar belakang masalah dan identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta kerangka pemikiran dan diakhiri dengan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II Landasan Teori

Pada Bab II ini, Penulis menguraikan pengertian dari pajak, kemudian Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000, Subjek dan objek Pajak Penghasilan, Kewajiban Pajak Subjektif, Cara Menghitung Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Subjek dan objek Pajak Penghasilan Badan, Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, serta kepatuhan dalam perpajakan.

BAB III Objek dan Metodologi Penelitian

Pada Bab III, Penulis menguraikan tentang objek penelitian, aspek-aspek yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB IV Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang sejarah KPP Jakarta Cakung Dua, fungsi dan struktur organisasi bidang kepegawaian KPP Jakarta Cakung Dua dan Hubungan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dengan menggunakan rasio vertikal dan horizontal, Proses penyelesaian SPT Tahunan

PPh Badan, dan diakhiri dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua serta langkah-langkah yang diambil oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

BAB V Penutup

Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kesimpulan yang memuat tentang kesimpulan atas pembahasan di dalam skripsi ini. Sub bab kedua mengenai saran-saran, di mana dalam sub bab ini disampaikan tentang saran penulis terhadap apa yang menjadi judul skripsi ini.

